

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alia Maerani, Ira, 2018, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang.
- Amiruddin, dan Asikin, Zainal, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andrisman, Tri, 2009, *Asas-asas dan Aturan umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung.
- Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta.
- BPHN, 2015, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta.
- Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2021, *Transportasi dalam Angka*, Yogyakarta.
- Fajar, Mukti, dan Achmad, Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi, 1996, *Hukum Pidana Ekonomi (Edisi Revisi Selaras Inpres No. 4 Tahun 1985)*, Erlangga, Jakarta.
- _____, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hanitijo Soemitro, Ronny, 1985, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- _____, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Kansil, C.S.T., 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 2021, *Manual Guide E-Tilang V.2.0*, Jakarta.



- Lamintang, P.A.F., 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi, dan Arief, Barda Nawawi, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Nawawi, Hadari, 1993, *Metode Penelitian Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Nurdin, Ismail, 2019, *Metode Penelitian Sosial*, Media Sahabat Cendekia, Bandung.
- O.S. Hiariej, Eddy, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Poerwadarminta, W.J.S., 1993, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- Risdiyanto, 2014, *Rekayasa dan Manajemen Lalu Lintas: Teori dan Aplikasi*, Leutika Prio, Yogyakarta.
- Saleh, Roeslan, 1978, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.
- Sudarsono, 2002, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Suparni, Niniek, 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafik, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, dan Mammudji, Sri, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soesilo, R., 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor.
- Waluyo, Bambang, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Depok.



B. Jurnal

AR, Suhariyono, “Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-undang”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 6, Nomor 4, Desember, 2009.

Budivaja, I.A., *et al.*, “Eksistensi Pidana Denda di dalam Penerapannya”, *Jurnal Hukum*, Volume XIX, Nomor 19, 2010.

Fauzani Raharja, Ivan, “Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan”, Volume 6, Nomor 2, Mei, 2014.

Herwangi, Yori, *et al.*, “Peran dan Pola Penggunaan Sepeda Motor Pada Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kawasan Perkotaan Yogyakarta”, *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Volume 26, Nomor 3, Desember, 2015.

Irfani, Nurfaqih, “Asas Lex Superior, Lex Specialis dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 16, Nomor 3, September, 2020.

Supriyadi, “Penetapan Tindak Pidana sebagai Kejahatan dan Pelanggaran dalam Undang-Undang Pidana Khusus”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 27, Nomor 3, Oktober, 2015.

Setiadi, Wicipto, “Sanksi Administratif sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 6, Nomor 4, Desember, 2009.

C. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Dinda Yashinta, Aiyudya, 2018, “Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Purworejo (Studi penerapan Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Dewi Adrianita, Thalia, 2018, “Implementasi Elektronik Tilang melalui Media CCTV berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Dhanendra Purbiyatma, Andreas, 2018, “Proses Acara Pemeriksaan Cepat dalam Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.



Yohannes Simanjuntak, Donny, 2009, “Efektivitas Sanksi Pidana Denda dalam Menekan Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Sleman “, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, Yogyakarta.

D. Internet

Administrator Media Indonesia, “Indonesia Juara 2 Tingkat Kecelakaan se-ASEAN”, <https://mediaindonesia.com/megapolitan/132294/indonesia-juara-2-tingkat-kecelakaan-se-asean> diakses pada 20 April 2021.

Badan Pusat Statistika, “Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis (Unit) 2018-2020”, <https://www.bps.go.id/indicator/17/57/1/perkembangan-jumlah-kendaraan-bermotor.html> diakses pada 20 April 2021.

Badan Pusat Statistika Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, “Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta (Jiwa)”, <https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/12/133/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-d-i-yogyakarta.html> diakses pada 11 Januari 2022.

Badan Pusat Statistika, “Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2020-2022”, <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html> diakses pada 18 Juni 2022.

Badan Pembangunan Jalan Tol, “Sejarah Jalan Tol”, <https://bpjt.pu.go.id/konten/jalan-tol/sejarah> diakses pada 11 Februari 2022.

Ditlantas Polda DIY, “Beranda”, diakses <https://www.ettle-diy.info/id> pada 26 Juli 2021.

Ditlantas Polda DIY, “Tentang ETLE”, <https://www.ettle-diy.info/id/mechanism> diakses pada 8 Juli 2021.

Ditlantas Polda DIY, “Tentang E-TLE”, <https://www.ettle-diy.info/id/mechanism> diakses pada 4 Oktober 2021.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Langgar”, <https://kbbi.web.id/langgar> diakses pada 22 Mei 2021.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Pelanggaran” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelanggaran> diakses pada 7 Maret 2022.



- Kusumasari, Diana, “Tentang RV, HIR, RBG, AB dan Keberlakuan Perpres No.68/2005”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-rv-hir-rbg-ab-dan-keberlakuan-perpres-no-68-2005-lt4f2f2e1966dac> diakses pada 7 Maret 2022.
- Kejaksaan Republik Indonesia, “E-Tilang”, <https://tilang.kejaksaan.go.id> diakses pada 3 Desember 2021.
- Kementrian Komunikasi dan Informatika, “Korlantas Polri Luncurkan ETLE Nasional Tahap 1”, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/33451/korlantas-polri-luncurkan-etle-nasional-tahap-i/0/berita> diakses pada 26 Juli 2021.
- Ojek Online, “Sistem Gaji Gojek 2021: Cara Kerja dan Sistem Pembayaran”, <https://ojekonline.co.id/sistem-gaji-gojek-2020-cara-kerja-dan-sistem-pembayarannya/> diakses pada 17 Januari 2022.
- Perwitasari, Nur Hidayah, “10 Pelanggaran Tilang Elektronik dan Mekanismenya”, diakses <https://tirto.id/gbAm> pada 24 Mei 2021.
- Pratiwi, Mahar, “6 Universitas Terbaik di Yogyakarta versi QS AUR 2022”, <https://edukasi.kompas.com/read/2021/11/03/150300171/6-universitas-terbaik-di-yogyakarta-versi-qs-aur-2022> diakses pada 11 Januari 2022.
- Reza, Muhamad, “Kepastian Hukum”, <https://www.metrokaltara.com/kepastian-hukum/> , diakses pada 22 Maret 2021.
- S.M. Sijabat, Togar, “Perbedaan Antara HIR dan RBG”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-antara-hir-dan-rbg-lt54dc318596a4d> diakses pada 7 Maret 2022.
- Saputra, Andi, “UU Cipta Kerja Hapus Kewenangan Pemda-Polri Soal Izin Bengkel Umum”, <https://news.detik.com/berita/d-5211291/uu-cipta-kerja-hapus-kewenangan-pemda-polri-soal-izin-bengkel-umum> diakses pada 15 Maret 2022.
- Susanto Ginting, Miko, “Apakah Penerima Surat Tilang Otomatis Jadi Tersangka?”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5239456141035/apakah-penerima-surat-tilang-otomatis-jadi-tersangka> diakses pada 6 Januari 2022.
- Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Solusi Bisnis Indonesia, “Kilas Balik Perkembangan Ojek Online di Indonesia Sepanjang 2015”, <http://stie-sbi.ac.id/?p=922&lang=id> diakses pada 8 Januari 2022.

T. Rahmawati, Wahyu, “Mulai Maret 2021, Tilang Elektronik Bakal Berlaku Nasional”, diakses <https://nasional.kontan.co.id/news/mulai-maret-2021-tilang-elektronik-bakal-berlaku-nasional> pada 25 Juli 2021.

E. Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Lainnya

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1951 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Lalu Lintas Jalan *Wegverkeer Ordonantie Staatsblad 1933 No. 86* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2742).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.



Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 1921).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326).

Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SKEP/443/IV/1198 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Blangko Tilang, 17 April 1998